

BAB VI

KESIMPULAN

Pada bagian ini yang merupakan bab terakhir akan disimpulkan secara garis besar mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama di lapangan dengan mengacu pada bab-bab sebelumnya serta pada bagian bab keempat dan kelima merupakan hasil penelitian dan analisis yang dikembangkan melalui rujukan-rujukan sumber referensi yang ada berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh.

Dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa faktor utama yang melatar belakangi kedatangan orang-orang Tionghoa ke Bandung ialah kepentingan ekonomi terutama setelah peraturan UU Agraria tahun 1870 diberlakukan, dimana wilayah Priangan terbuka bagi penanaman swasta di bidang perkebunan, membuka peluang bisnis kepada pedagang Cina yang terampil sebagai pedagang perantara terutama setelah Bandung ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara pada awal abad 20.

Ketika orang-orang Tionghoa mulai menetap di Bandung, mereka tidak lantas menguasai tempat-tempat usaha yang strategis seperti di Pasar Baru, Suniaraja, Banceuy, ABC, Asia-Afrika, dan Dalem Kaum seperti sekarang ini. Namun mereka memulainya dengan usaha kecil-kecilan seperti pedagang keliling /kelontong. Makin lama jumlah orang-orang Tonghoa yang sukses ditunjang dengan keterampilan dalam berdagang, banyak yang berhasil membangun usaha-usaha perdagangan eceran.

Sementara keberadaan kampung-kampung Pecinan yang tersebar di banyak tempat di Bandung lebih dikonsentrasikan selalu menempati pusat-pusat kota. Sampai pada masa Revolusi Kemerdekaan mereka sudah mengambil alih banyak perusahaan-perusahaan asing yang tadinya ditempati oleh Belanda. Secara pasti mulai mengubah struktur perekonomian di Bandung, yaitu orang-orang Tionghoa sudah mulai menggeser kedudukan para pengusaha-pengusaha pribumi sebagai perantara perdagangan sejak tahun 1950-an.

Orang-orang Tionghoa yang terbagi dalam dua kelompok sejak masa Sukarno yaitu kelompok Cina pekerja dan kelompok Cina pedagang relatif berimbang, dimana konsentrasi orang-orang Cina baik Totok maupun Peranakan tidak dibatasi dalam perdagangan saja, namun juga dalam bidang-bidang profesional lainnya seperti Pegawai Negeri, Guru, Dokter, Ilmuwan, Arsitektur, dan profesi lainnya tetap banyak saat itu terutama ketika berdirinya sekolah-sekolah Swasta Tionghoa tahun 1950-an.

Ketika peraturan PP-10 tahun 1959 mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1960, posisi dan kedudukan ekonomi orang-orang Tionghoa khususnya di pedesaan mulai goyah, dimana banyak di antara mereka yang diusir untuk pulang ke negeri asalnya di Tiongkok. Sementara tempat tinggal dan pabrik-pabrik mereka di kabupaten sebagian besar ada yang dijual ke pihak lain dan diambil alih oleh pemerintah. Di Bandung terutama daerah-daerah kabupaten seperti Cimahi, Padalarang, Majalaya, Lembang, yang merupakan wilayah industri pabrik-pabrik besar milik orang-orang Tionghoa. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kegiatan distribusi barang-barang produksi dari daerah kabupaten ke Kotamadya menjadi

terganggu dan terjadi penurunan dalam sektor ekonomi saat itu. Namun secara makro dengan mengalirnya para pedagang-pedagang Cina dari wilayah-wilayah Kabupaten Bandung ke kota justru mengakibatkan berkumpulnya sumber-sumber modal orang Cina dari desa ke kota, disamping makin meningkatnya daya tarik kota Bandung, akibat kemajuan disektor pendidikan, industri dan perdagangan.

Dalam hal ini kontribusi dan peranan ekonomi orang-orang Tionghoa terhadap pembangunan kota Bandung sejak masa Demokrasi Terpimpin makin memperlebar Gap (jurang) antara orang-orang Tionghoa dan pribumi dalam bidang-bidang professional lainnya. Sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk-bentuk sikap stereotif negatif terhadap orang Tionghoa di Bandung yang terkesan eksklusif, sehingga terjadi peristiwa krusial aksi massa yang dipelopori oleh para mahasiswa disertai pengrusakan-pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas orang-orang Tionghoa di Bandung pada tanggal 10 Mei tahun 1963. Aksi ini dengan cepat menyebar ke berbagai daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, proses Asimilasi yang selama ini selalu dicanangkan oleh pemerintah antara golongan orang-orang Tionghoa baik Totok dan Peranakan di Bandung sulit dilaksanakan.

Dengan demikian perkembangan sarana industri dan pendidikan di kota Bandung dan sarana perkotaan lainnya menuju kota yang modern, pada akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan sektor riil seperti perdagangan, industri maju, dan banyak bidang yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Daya tarik ini yang mendorong orang Cina datang ke Bandung dan juga orang-orang Cina dari negeri asalnya. Perubahan-perubahan yang terjadi

termasuk kebijakan pemerintah dari zaman kolonial hingga masa Demokrasi Terpimpin sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi orang Cina di Bandung, termasuk membatasi eksistensi mereka dalam bidang perekonomian di Kabupaten. Pada akhirnya tetap menempatkan mereka sebagai kaum minoritas yang unggul di bidang industri dan perdagangan yang terbukti menguasai kawasan-kawasan bisnis pusat pertokoan di Bandung sampai saat ini.

